

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### A. Kondisi Geografis Negara Indonesia

Berikut gambaran umum yang di sajikan penulis berupa kondisi geografis dan kondisi ekonomi di 33 provinsi di Indonesia.



Sumber : Badan Pusat Statistik D. i. Y

**Gambar 4. 1**  
**Peta Negara Indonesia**

Berdasarkan gambar diatas letak geografis negara Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra. Tepatnya Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia berada di 6° Lintang Utara - 11° Lintang Selatan dan antara 95° Bujur Timur – 141° Bujur Timur. Dilihat dari letak astronomis, Indonesia terletak pada kawasan yang beriklim

tropis. Letak Indonesia yang berada di kawasan tropis membuat negara Indonesia selalu disinari oleh matahari sepanjang tahun. Sehingga di Indonesia hanya terdapat dua kali pergantian musim dalam satu tahun, yaitu musim kemarau dan hujan. Indonesia yang beriklim tropis tentu saja dianugerahi dengan kelimpahan sumber daya alam yang luar biasa, curah hujan yang tinggi membuat tanah terjaga kesuburannya. Negara Indonesia juga memiliki beragam flora dan fauna. Letak yang strategis tentu saja dapat mempengaruhi perekonomian negara Indonesia. Letak Indonesia yang berada di persimpangan lalu lintas dunia dapat menentukan masa depan dari negara tersebut saat melakukan hubungan internasional. Letak negara Indonesia yang berada di garis bujur tentu saja memiliki pengaruh, yaitu menyebabkan terjadinya perbedaan waktu. Terdapat tiga pembagian waktu di Indonesia yaitu Indonesia bagian timur (WIT), Indonesia bagian tengah (WITA), dan Indonesia bagian barat (WIB). Indonesia memiliki total luas wilayah sebesar 7,9 juta km<sup>2</sup> yang terbagi jadi tiga bagian yaitu 1,8 juta km<sup>2</sup> termasuk wilayah daratan, wilayah laut teritorial sebesar 3,2 juta km<sup>2</sup>, serta wilayah laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2,9 juta km<sup>2</sup>. Berikut rincian dari luas negara Indonesia:

**Tabel 4. 1**  
**Luas Wilayah 33 Provinsi di Indonesia**

NO	Nama Provinsi	Luas Wilayah(km <sup>2</sup> )
1	Aceh	58.375,63
2	Sumatra Utara	72.981,23
3	Sumatra Barat	42.297,30

<b>NO</b>	<b>Nama Provinsi</b>	<b>Luas Wilayah(km<sup>2</sup>)</b>
4	Riau	87.023,66
5	Kepulauan Riau	253.420
6	Jambi	53.435,92
7	Sumatra Selatan	87.017,41
8	Bangka Belitung	16.493,54
9	Bengkulu	19.788,70
10	Lampung	35.376,50
11	DKI Jakarta	664,01
12	Jawa Barat	35.377,76
13	Banten	9.662,92
14	Jawa Tengah	32.800,69
15	DI Yogyakarta	3.133,15
16	Jawa Timur	47.799,75
17	Bali	5.780,06
18	Nusa Tenggara Barat	18.572,32
19	Nusa Tenggara Timur	48.718,10
20	Kalimantan Barat	147.307,00
21	Kalimantan Tengah	153.564,50
22	Kalimantan Selatan	38.744,23
23	Kalimantan Timur	129.066,64
24	Sulawesi Utara	13.851,64
25	Sulawesi Barat	16.787,18
26	Sulawesi Tengah	61.841,29
27	Sulawesi Tenggara	38.067,70
28	Sulawesi Selatan	46.717,48
29	Gorontalo	11.257,07
30	Maluku	46.914,03
31	Maluku Utara	31.982,50
32	Papua	319.036,05
33	Papua Barat	99.671,63
<b>Luas Indonesia</b>		<b>2.011.519,35</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik D. I. Y*

Berdasarkan Global Competitiveness Report 2015-2016, yang dibuat oleh lembaga WEF (World Economic Forum). Saat ini infrastruktur Indonesia menempati urutan ke-62 dari 140 negara. Indonesia masih pada

peringkat yang bertahan di standar rata-rata dan hal ini dapat menyebabkan kemunculan beberapa masalah besar dalam perekonomian Indonesia. Kurangnya infrastruktur di Indonesia menyebabkan hambatan dalam pembangunan ekonomi, yaitu biaya logistik yang sangat tinggi. Biaya logistik yang tinggi bisa menyebabkan perbedaan harga yang substansial pada setiap provinsi-provinsi di Indonesia. Salah satu infrastruktur yang perlu dikerjakan yaitu infrastruktur sosial yaitu termasuk sistem pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Pentingnya memperbaiki keadaan infrastruktur akan membantu memperbaiki iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik.

#### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari seberapa besar pertumbuhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah perekonomian dan dihitung dalam selang waktu tertentu. Produksi yang dimaksud ialah diukur dengan nilai tambah yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi yang tersedia di wilayah bersangkutan, nilai tambah ini dihitung secara total dan dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi berperan sebagai indikator yang menunjukkan tingkat kemakmuran suatu negara, salah satu faktor yang memicu pertumbuhan yang signifikan ialah sektor keuangan. Saat pertumbuhan positif, maka akan tercermin bahwa perekonomian sedang mengalami peningkatan dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Sebaliknya apabila pertumbuhan negatif, maka perekonomian akan

mengalami penurunan dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Pembangunan yang tinggi pada suatu wilayah akan membantu menaikkan ekonomi wilayah tersebut. PDRB merupakan pengukur tingkat pendapatan pada suatu provinsi. PDRB mempengaruhi suatu perekonomian dengan cara yaitu mendistribusikan pendapat bruto dan kekayaan serta menambah tingkat output. Sehingga pembangunan dalam suatu wilayah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan pada wilayah tersebut.

**Tabel 4. 2**  
**Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Konstan**  
**Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016 (Miliar Rupiah)**

<b>Provinsi</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Aceh	108914,2 8	111992,2 8	113836,0 5	112672,4 4	116384,0 0
Sumatra Utara	375924,1 4	398779,2 5	419649,2 8	440955,8 5	463775,0 0
Sumatra Barat	118724,4 2	125874,7 0	133240,3 0	140529,1 5	148134,0 0
Riau	425626,0 0	4362606, 00	447616,2 3	448936,6 0	458997,0 0
Jambi	104615,0 8	112008,7 0	120696,2 3	125038,7 1	130501,0 0
Sumatra Selatan	220459,2 0	232353,6 3	243228,5 7	254022,8 6	266854,0 0
Bengkulu	32363,04	34329,79	36215,78	38067,50	40080,00
Lmpung	170769,2 1	180636,6 6	189809,4 6	199525,4 2	209814,0 0
Kepulauan Bangka	40104,91	42198,23	44171,62	45961,46	47851,00
Kepulauan Riau	128034,9 7	137134,8 5	147167,5 7	155162,6 4	162924,0 0
DKI Jakarta	1222527, 92	1297195, 43	1374348, 60	1454102, 11	1540078, 00
Jawa Barat	1028409, 74	1093585, 51	1148948, 82	1207001, 49	1275528, 00
Jawa Tengah	691343,1 2	726899,7 1	766271,7 7	806609,0 2	849313,0 0

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
DIYogyakarta	71702,45	75637,01	79557,25	83461,57	87688,00
Jawa Timur	1124464,64	1192841,86	1262700,21	1331418,24	1405561,00
Banten	310385,59	332517,42	350699,73	367959,22	387824,00
Bali	106951,46	114109,33	121777,64	129137,91	137286,00
NTB	66340,81	69755,56	73285,09	43846,61	94538,00
NTT	48863,19	51512,25	54108,48	88866,75	59705,00
Kalimantan Barat	96161,93	101970,46	107092,03	112261,17	118193,00
Kalimantan Tengah	64649,17	69420,99	73734,87	78890,00	83909,00
Kalimantan Selatan	96697,84	101879,38	106820,72	110890,73	115738,00
Kalimantan Timur	469646,25	438354,72	444494,31	439716,08	439088,00
Sulawesi Utara	58677,59	62422,63	66358,76	70418,81	74771,00
Sulawesi Tengah	62249,53	68191,86	71677,65	82829,23	91053,00
Sulawesi Selatan	202184,59	217618,45	234083,97	250729,56	269423,00
Sulawesi Tenggara	59785,40	64273,78	68298,72	72988,30	77748,00
Gorontalo	17987,07	19369,15	20781,31	22070,45	23508,00
Sulawesi Barat	20786,89	22229,24	24169,34	25983,38	27525,00
Maluku	21000,08	22104,14	23585,07	24843,65	26284,00
Maluku Utara	17120,07	18211,29	19211,94	20377,47	21557,00
Papua Barat	44423,34	47705,86	50272,01	52347,42	54711,00
Papua	107890,94	116428,61	120216,97	131270,88	142221,00

Sumber : Badan Pusat Statistik D. i. Y

Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan PDRB provinsi. Dapat di lihat bahwa jumlah PDRB dari 33 provinsi selama 5 tahun berturut-turut menunjukkan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Provinsi yang memiliki nilai PDRB tertinggi yaitu provinsi DKI Jakarta dan Jawa

Timur dengan PDRB perkapita lebih dari 1000 miliar. Penyebab tingginya PDRB pada provinsi tersebut ialah tingginya nilai perekonomian dan banyaknya pabrik yang dapat meningkatkan pertumbuhan produksi barang dan jasa. PDRB terendah yaitu dengan nilai PDRB kurang dari 50 miliar rupiah yaitu provinsi Maluku Utara.

## 2. Penanaman Modal dalam Negeri

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan dimana terjadi penanaman modal yang digunakan untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dari Indonesia dengan menggunakan modal dari wilayah Indonesia juga. Dalam suatu perekonomian tentu saja diperlukannya investasi. Investasi memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian suatu negara. Dengan adanya investasi-investasi baru maka memungkinkan akan terciptanya barang modal jenis baru sehingga secara tidak langsung akan menyerap faktor produksi yang akan membuka lapangan kerja sehingga pengangguranpun berkurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan penambahan input yang akan menyebabkan output dan pendapatan pada faktor produksi bertambah, sehingga investasi akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 4. 3**  
**Penanaman Modal dalam Negeri Menurut Provinsi Tahun 2012-2016**  
**(Juta US\$)**

<b>Provinsi</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Aceh	60,20	3636,40	5110,30	4192,41	2456,10
Sumatra Utara	2550,30	5068,90	4223,90	4287,42	4864,20

<b>Provinsi</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Sumatra Barat	885,30	677,80	421,10	1552,50	3795,60
Riau	5450,40	4874,30	7707,60	9943,00	6613,70
Jambi	1445,70	2799,60	908,00	3540,20	3884,40
Sumatra Selatan	2930,60	3396,00	7042,80	10944,10	8534,10
Bengkulu	52,60	109,60	7,80	553,90	949,10
Lampung	304,20	1325,30	3495,70	1102,30	6031,80
Kepulauan Bangka	533,50	608,20	615,50	1023,70	2202,00
Kepulauan Riau	43,50	417,70	28,50	612,10	492,50
DKI Jakarta	8540,10	5754,50	17811,50	15512,72	12216,90
Jawa Barat	11384,00	9006,10	18726,90	26272,90	30360,20
Jawa Tengah	5797,10	12593,60	13601,60	15410,70	24070,40
DI Yogyakarta	334,00	283,80	703,90	362,40	948,60
Jawa Timur	21520,30	34848,90	38132,00	35489,80	46331,60
Banten	5117,50	4008,70	8081,30	10709,90	12426,30
Bali	3108,00	2984,70	252,80	1250,40	482,30
NTB	45,40	1398,00	212,50	347,80	1342,80
NTT	14,40	17,60	3,60	1295,70	822,20
Kalimantan Barat	2811,00	2522,10	4320,80	6143,53	9015,50
Kalimantan Tengah	4529,60	1835,30	980,40	1270,10	8179,10
Kalimantan Selatan	3509,80	8299,20	2616,50	2060,40	6163,00
Kalimantan Timur	5889,30	16034,60	12859,00	9611,30	6885,10
Sulawesi Utara	678,50	66,80	83,00	270,60	5069,60
Sulawesi Tengah	602,80	605,30	95,80	968,40	1081,20
Sulawesi Selatan	2318,90	921,00	4949,60	9215,30	3334,60
Sulawesi Tenggara	907,30	1261,60	1249,90	2015,40	1794,20
Gorontalo	164,90	84,40	45,10	94,30	2202,50
Sulawesi Barat	228,60	685,10	690,10	1103,80	84,10
Maluku	3,40	59,92	156,30	142,20	11,40
Maluku Utara	320,50	1114,90	100,00	48,23	8,80
Papua Barat	45,80	304,00	20,20	63,45	10,60
Papua	54,70	584,30	249,90	1275,22	220,50

*Sumber : Badan Pusat Statistik D. i. Y*



Pada tabel 4. 3 diatas ditunjukkan realisasi dari penanaman modal dalam negeri di Indonesia. Penanaman modal ini relatif tidak stabil dikarenakan adanya proyek-proyek yang berbeda pada setiap provinsi sehingga menyebabkan ketergantungan pada besar kecilnya investasi. Penanaman modal dalam negeri dengan rata-rata terbesar yaitu provinsi Jawa Barat, hal ini disebabkan karena banyaknya investor yang fokus pada sektor bidang usaha industri. Penanaman modal dalam negeri dengan rata-rata paling kecil yaitu provinsi Gorontalo, hal ini disebabkan karena para perusahaan yang tidak memberikan LKPMnya dan ada beberapa perusahaan yang mengalami pailit.

### 3. Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan produksi. Jumlah tenaga kerja yang meningkat akan membantu kegiatan ekonomi dengan meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan penduduk. Tenaga kerja berperan penting karena membantu dalam menyediakan tenaga usahawan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang baik akan mengurangi angka pengangguran nasional.

**Tabel 4. 4**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Pada Setiap Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016 (Juta)**

<b>Provinsi</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Aceh	1798547	1824586	1931823	1966018	2087045
Sumatra Utara	5751682	5899560	5881371	5962304	5991229
Sumatra Barat	2037642	2005625	2180336	2184599	2347911

<b>Provinsi</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Riau	2399002	2481361	2518485	2554296	2765946
Jambi	1423624	1482471	1491038	1550403	1624522
Sumatra Selatan	3532932	3464620	3692806	3695866	3998637
Bengkulu	830266	801146	868794	904317	964971
Lampung	3449307	3385046	3673158	3635258	3931321
Kepulauan Bangka	824567	596786	604223	623949	686830
Kepulauan Riau	583102	848660	819656	836670	859813
DKI Jakarta	4838596	4712836	4634369	4724029	4861832
Jawa Barat	18321108	18413984	19230943	18791482	19292038
Jawa Tengah	16132890	15964048	16550682	16435142	16511136
DI Yogyakarta	1867708	1847070	1956043	1891218	2042400
Jawa Timur	19081995	19266457	19306508	19367777	19114563
Banten	4605847	4637019	4853992	4825460	5088497
Bali	2268708	2273897	2272632	2324805	2416555
NTB	1978764	1981842	2094100	2127503	2367310
NTT	2095683	2075948	2174228	2219291	2277068
Kalimantan Barat	2106514	2053823	2226510	2235887	2287823
Kalimantan Tengah	1070210	1063711	1154489	1214681	1248189
Kalimantan Selatan	1821327	1811096	1867462	1889502	1965088
Kalimantan Timur	1619118	1624272	1677466	1423957	1581239
Sulawesi Utara	957292	946852	980756	1000032	1110564
Sulawesi Tengah	1165442	1175930	1293226	1327418	1459803
Sulawesi Selatan	3351908	3291280	3527036	3485492	3694712
Sulawesi Tenggara	975879	968949	1037419	1074916	1219548
Gorontalo	445729	449104	479137	493687	546668
Sulawesi Barat	548783	523960	595797	595905	624182
Maluku	610362	598792	601651	655063	690786
Maluku Utara	443943	445358	459017	482543	503479
Papua Barat	341741	353619	378436	380226	402360
Papua	1527933	1634332	1617437	1672480	1664485

*Sumber : Badan Pusat Statistik D. i. Y*

Berdasarkan tabel 4. 4 diatas bahwa penduduk dengan usia 15 tahun keatas yang bekerja di Indonesia pada setiap provinsi mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah tenaga kerja paling banyak berada di provinsi Jawa Timur, hal ini dikarenakan adanya infrastruktur yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di daerah tersebut. Jumlah tenaga terendah terdapat pada provinsi Papua Barat.

#### 4. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf berperan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Semakin tinggi angka melek huruf maka semakin banyak sumber daya yang dapat membaca sehingga memiliki pengetahuan yang lebih luas. Semakin tinggi pengetahuan sumber daya dan semakin tinggi kemampuan yang dimiliki maka akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pembangunan daerah dan nasional. Salah satu cara mengukur sejauh mana pendidikan pada suatu daerah yaitu dengan melihat nilai dari Angka Melek Huruf (AMH) dari daerah tersebut. Angka Melek Huruf dihitung berdasarkan banyaknya proporsi dari jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis pada suatu daerah. Berikut merupakan data AMH penduduk Indonesia pada setiap provinsi tahun 2012-2016:

**Tabel 4.5**  
**Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Pada Setiap Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016 (Persen)**

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	96,11	96,66	98,25	97,63	97,74
Sumatra Utara	97,35	97,81	98,57	98,68	98,88
Sumatra Barat	96,67	97,38	98,44	98,59	98,81
Riau	97,79	97,88	98,75	98,87	99,07
Jambi	97,80	96,72	97,94	97,84	98,01

<b>Provinsi</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Sumatra Selatan	95,97	97,24	98,14	98,22	98,46
Bengkulu	96,90	96,48	97,52	97,63	97,75
Lampung	95,88	95,81	97,46	96,67	96,78
Kepulauan Bangka	95,69	96,41	97,60	97,63	97,66
Kepulauan Riau	95,13	97,91	98,83	98,79	98,84
DKI Jakarta	99,07	99,14	99,54	99,59	99,64
Jawa Barat	96,18	96,70	97,96	98,01	98,22
Jawa Tengah	96,51	91,27	94,45	93,12	93,30
DI Yogyakarta	90,45	92,82	96,87	94,50	94,59
Jawa Timur	92,02	90,14	93,18	91,47	91,59
Banten	89,28	96,64	97,90	97,37	97,55
Bali	90,17	90,84	93,54	92,77	92,82
NTB	83,68	84,67	88,11	86,97	87,06
NTT	88,73	90,36	92,80	91,45	91,52
Kalimantan Barat	91,13	91,34	93,47	92,32	92,39
Kalimantan Tengah	97,48	97,93	98,82	98,88	98,97
Kalimantan Selatan	96,43	97,04	98,19	98,21	98,28
Kalimantan Timur	97,55	97,51	98,59	98,69	98,82
Sulawesi Utara	98,85	99,13	99,60	99,53	99,79
Sulawesi Tengah	95,22	95,95	97,08	97,34	97,51
Sulawesi Selatan	94,95	90,16	92,81	91,29	91,52
Sulawesi Tenggara	88,73	92,61	94,03	94,10	94,25
Gorontalo	88,79	96,83	97,90	98,24	98,44
Sulawesi Barat	91,49	90,79	93,86	92,64	92,75
Maluku	97,08	97,83	98,77	98,85	98,94
Maluku Utara	96,43	97,37	98,36	98,49	98,67
Papua Barat	65,69	95,59	96,75	96,88	97,05
Papua	94,74	67,31	70,92	70,83	71,02

*Sumber : Badan Pusat Statistik D. i. Y*

Dari tabel 4. 5 diatas dapat dilihat nilai dari angka melek huruf pada setiap provinsi di Indonesia. Jumlah angka melek huruf pada usia penduduk 15 tahun keatas rata-rata mengalami peningkatan terus-menerus.

Nilai angka melek huruf tertinggi yaitu provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Utara. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada provinsi tersebut memiliki penduduk dengan perekonomian diatas rata-rata dan pengetahuan tentang pendidikan yang lebih tinggi. Nilai angka melek huruf paling rendah yaitu di provinsi Papua Barat, rendahnya nilai angka melek huruf dikarenakan rendahnya tingkat sarana prasarana pendidikan di provinsi tersebut.

## 5. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan sejumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah guna membantu pembangunan ekonomi di Indonesia. Besar kecilnya pengeluaran pemerintah sangat bergantung pada pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan diterima oleh pemerintah. Semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah maka pemerintah akan menambah jumlah pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah yang berjumlah besar tentu saja akan memberikan dampak pembangunan yang besar pula. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk mengganti infrastruktur yang sudah lama dengan yang baru sehingga kinerja ekonomi akan menjadi lebih baik dan terjadi pembangunan yang lebih baik pula. Berikut merupakan data pengeluaran pemerintah Indonesia pada setiap provinsi tahun 2012-2016:

**Tabel 4. 6**  
**Pengeluaran Pemerintah Berupa Belanja Negara Pada Setiap Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016 (Juta rupiah)**

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
Aceh	8757320	11220428	12045848	12149422	12119713

<b>Provinsi</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Sumatra Utara	7633634	7260468	7808557	7959167	9476424
Sumatra Barat	2962291	3113313	3483673	4022257	4504038
Riau	6670764	7525283	5602074	7760972	8731938
Jambi	2531598	3010741	3204633	3425566	3294485
Sumatra Selatan	5060923	5678704	5770733	5190199	4962573
Bengkulu	1518453	1727006	1934722	2282345	2029691
Lampung	3834736	3884536	4454187	4781202	5476922
Kepulauan Bangka	1332039	1609667	1596087	1869959	2069868
Kepulauan Riau	2249826	2715832	3312459	2605394	2782118
DKI Jakarta	31558707	38301502	37799664	43031323	47128810
Jawa Barat	16922477	18396745	20797988	24417606	27621964
Jawa Tengah	11446844	12724776	15086065	17820760	19354375
DI Yogyakarta	2053826	2509643	2981068	3496426	3847963
Jawa Timur	15311543	16738658	20006319	22946308	23859954
Banten	5317736	5295139	6192156	8084140	8925813
Bali	3562733	3868741	4491646	4999031	5420934
NTB	2189182	2379594	2614100	3364904	3764302
NTT	2164356	2381311	2693049	3328496	3702912
Kalimantan Barat	3043957	3296607	3652914	4123636	4320619
Kalimantan Tengah	2351347	2928725	3235800	3482434	3174706
Kalimantan Selatan	4004269	4750074	4917828	5102865	5178715
Kalimantan Timur	11357198	13780245	11274556	8598988	7601242
Sulawesi Utara	1771118	2025591	2229484	2693084	2801145
Sulawesi Tengah	2013022	2145228	2445661	2953281	3178114
Sulawesi Selatan	4603648	4924218	5600387	6149605	6930979
Sulawesi Tenggara	1714896	1812945	2088600	2349274	2663870
Gorontalo	885021	1050817	1204490	1407931	1595895
Sulawesi Barat	868133	1044071	1227422	1385842	1765978
Maluku	1355988	1576449	1726133	2280091	2798916
Maluku Utara	1259660	1387593	1387593	1808760	2023862
Papua Barat	3898932	4512430	5428849	6880167	6464612
Papua	7239667	8171352	10303787	12396447	11968494

*Sumber : Badan Pusat Statistik D. i. Y*

Dari tabel 4. 6 diatas dapat dilihat jumlah pengeluaran pemerintah pada setiap provinsi di Indonesia. Setiap tahunnya pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan. Pengeluaran pemerintah tertinggi yaitu pada provinsi DKI Jakarta, tingginya pengeluaran pemerintah dikarenakan banyaknya infrastruktur pada provinsi tersebut. Pengeluaran pemerintah provinsi Sulawesi Barat, hal ini terjadi karena sedikitnya infrastruktu yang harus dibangun pada provinsi tersebut.